

Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara

Raihan Alfi¹, Fakhri Sabiq Muawal², Galih Arjuna Ismail³

TransBorders*

Abstract

China has turned into one of the most powerful countries in the world or "Great Powers" which has a vision to become a hegemonic country. Southeast Asia as China's backyard was the beginning of China's expansion to the world. China-ASEAN relations are very important because ASEAN is a strategic partner of China in trade cooperation. ASEAN can be a profitable companion for China in spreading its influence to the world. However, it is not that easy for ASEAN to support and assist China in achieving it. China spreads its influence through political, economic, socio-cultural and military aspects. In each of these aspects, China has a clear and measured strategy to implement it in order to achieve hegemony in Southeast Asia. The growth and rising of China into a great power is a testament to the massive effort made by China. This study analyzes the China-ASEAN relations in the efforts made by China with ASEAN. The author uses qualitative research methods with literature study to obtain various sources about China-ASEAN relations. It is undeniable that slowly China has become a new hegemon. This is evidenced by the massive influence of China in all aspects, especially the economy and military, which will slowly change the status quo in the international system.

Keywords: *China-ASEAN; Hegemony; Southeast Asia*

Abstrak

Tiongkok berubah menjadi salah satu negara dengan kekuatan besar di dunia atau "Great Powers" yang memiliki visi untuk menjadi negara hegemon. Asia Tenggara sebagai halaman belakang Tiongkok menjadi awal dari dimulainya ekspansi Tiongkok ke dunia. Hubungan Tiongkok-ASEAN sangatlah penting karena ASEAN merupakan mitra strategis Tiongkok kerja sama perdagangan. ASEAN dapat menjadi teman yang menguntungkan bagi Tiongkok dalam menyebarkan pengaruhnya ke dunia. Namun, tidak semudah itu bagi ASEAN untuk mendukung dan membantu Tiongkok dalam meraihnya. Tiongkok menyebarkan pengaruhnya melalui aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dalam setiap aspek tersebut, Tiongkok memiliki strategi yang jelas dan terukur untuk melaksanakannya demi meraih hegemoni di Asia Tenggara. Bertumbuh dan bersinarnya Tiongkok menjadi kekuatan besar adalah bukti dari masifnya usaha yang dilakukan Tiongkok. Penelitian ini menganalisis hubungan Tiongkok-ASEAN dalam usaha-usaha yang dilakukan Tiongkok dengan ASEAN. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan berbagai sumber tentang hubungan Tiongkok-ASEAN. Tidak dapat

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Email: raihan19017@mail.unpad.ac.id

² Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Email: fakhri19001@mail.unpad.ac.id

³ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Email: galih19003@mail.unpad.ac.id

* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS
Email: trans'borders@unpas.ac.id

dipungkiri bahwa secara perlahan Tiongkok telah menjadi hegemon baru. Hal ini dibuktikan dengan masifnya pengaruh Tiongkok dalam segala aspek, utamanya ekonomi dan militer yang secara perlahan akan merubah status quo dalam sistem internasional.

Kata kunci: Hubungan Tiongkok-ASEAN; Hegemoni; Asia Tenggara

Pendahuluan

Sebuah negara hadir dan berdiri karena banyak hal yang menjadi penopang dan fondasi dasarnya. Salah satu yang sering sekali disebut oleh kaum realis adalah keinginan mereka untuk *survive* atau bertahan hidup. Entah bertahan hidup untuk siapa tepatnya. Barangkali untuk masyarakat didalamnya, barangkali untuk elit politik, atau barangkali untuk sesuatu yang lebih kompleks daripada itu semua. Namun, tidak dapat dipungkiri ketika sebuah negara sudah menunaikan hal-hal wajib yang mereka miliki, mereka kemudian memiliki ambisi tersendiri dan lebih besar serta, lebih menguntungkan bagi mereka. Salah satu dari sekian ambisi tersebut dinamakan sebagai hegemon. Hal ini pun bisa ditarik hubungan dengan apa yang Keohane lihat sebagai sebuah hegemon. Hegemon, adalah suatu keadaan dimana kita memiliki sumber daya material yang berlebih. Lebih kurangnya begitu pendapat Keohane.

Upaya hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara seperti yang dikatakan oleh Vu (2017) bahwa proses tersebut sedang berlangsung yang dibantu dengan adanya China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA). Adanya CAFTA membuktikan Tiongkok memiliki figur “kepemimpinan” di Asia Tenggara. Godwin (2004) memiliki argumen yang berbeda yang menganggap Tiongkok sulit untuk menjadi hegemon di Asia Tenggara. Walaupun dengan berbagai kerja sama dan hubungan ekonomi Tiongkok-ASEAN, banyak pihak yang ingin mencegah Tiongkok untuk menjadi

hegemon. Negara-negara ASEAN pun akan bergantung pada pihak luar untuk menjaga Asia Tenggara dari hegemoni Tiongkok.

Hal serupa juga dikatakan oleh Roy (2020), negara-negara ASEAN tidak akan tunduk kepada hegemoni dan ambisi Tiongkok. Hal ini dipersulit dengan adanya konflik LCS serta strategi *hedging* yang dilakukan ASEAN terhadap Tiongkok. Beberapa negara-negara ASEAN juga memiliki kerja sama keamanan dengan AS, yang membantu ASEAN untuk menentang Tiongkok.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Truong-Minh Vu (2017) mengenai kepemimpinan (hegemon) Tiongkok di Asia Tenggara berdasarkan pada konsep “*international leadership*”. Paul Godwin (2004) meneliti tentang kemungkinan dan cara-cara Tiongkok untuk menjadi regional hegemon dan implikasinya pada pihak luar (AS). Sedangkan, Denny Roy (2020) meneliti potensi Tiongkok untuk menjadi regional hegemon dan menyimpulkan bahwa Tiongkok tidak akan menjadi regional hegemon. Kebaruan penelitian ini menitikberatkan pada usaha-usaha Tiongkok dalam menjadi regional hegemon di Asia Tenggara dan hubungannya dengan ASEAN dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer.

Hal ini kemudian sejalan dengan apa yang pada penelitian ini ingin angkat, perihal Tiongkok yang merangkak naik untuk menjadi hegemon. Banyak sekali pendapat yang saling berseberangan perihal hal tersebut. Ada yang menyatakan kalau ini adalah sebuah hal yang sangat mungkin

terjadi, mengingat Tiongkok sudah memiliki sebuah hal yang menjadi keuntungan dalam membangun hegemon. Hal menguntungkan yang dimaksud tersebut adalah melimpahnya jumlah penduduk mereka dan tersebarnya penduduk mereka diseluruh dunia. Tidak sedikit pula tapi yang menyatakan kalau mereka (Tiongkok), hanya menang dalam kata-kata tapi minim aksi. Jauh sekali bila Tiongkok ingin bersaing dengan kekuatan Amerika Serikat. Pernah ada sebuah kutipan oleh George Friedman, seorang CEO perusahaan intelijen swasta STRATFOR. Dalam sebuah tulisan kurang lebihnya ia menyatakan sebagai berikut, “bahkan kekuatan militer seluruh dunia digabungkan, tidak akan bisa mengalahkan pasukan U.S. Navy yang dimiliki oleh Amerika Serikat” (Herrington, 2011:2). Memang pernyataan yang sedikit angkuh dan bagi banyak orang tidak terlalu masuk akal. Sebab memang benar, untuk menjadi hegemon tidak hanya perihal kekuatan militer melulu. Tapi yang tidak bisa kita sepelekan, Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara hegemon saat ini adalah sebuah negara yang berangkat dengan menggunakan kekuatannya dalam membangun pengaruh di seluruh dunia.

Memang tidak bisa dikatakan bahwa militer yang dimiliki oleh Tiongkok masuk kedalam kategori lemah. Beberapa pembaharuan dan kenaikan belanja negara mereka pun bisa dikatakan mereka niat untuk memperbaiki dunia militer mereka. Dan satu hal yang special, Tiongkok melihat mereka bisa menyebarkan hegemon melalui dunia perekonomian dan *soft power* yang mereka miliki. Secara ekonomi, mereka memulai dengan cara memaksa para warganya untuk mencintai produk mereka dan membeli produk buatan dalam negeri mereka, dalam rangka untuk memberikan keuntungan pada

negara mereka sendiri. Setelah ini ditanamkan dalam pola pikir masyarakat, mereka mulai memaksa warga mereka untuk kreatif dan menjajal pasar internasional. Terbukti, banyak sekali produk Tiongkok yang tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka berharap, dengan cara “mengelilingi” masyarakat dunia dengan produk buatan negeri mereka dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa mengubah stigma masyarakat terhadap hegemon Amerika Serikat yang itu-itu melulu. Bagi masyarakat awam, tentu hal yang sudah dicapai oleh Tiongkok ini adalah sebuah pencapaian besar dan sudah bisa dikategorikan sebagai hegemon. Tetapi merujuk pada pernyataan John Mearsheimer, ia melihat bahwa hegemoni itu adalah sebuah hal yang sangat jarang terjadi. Hal ini dikarenakan biaya ekspansi yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya justru lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapat sebelum dominasi dapat tercapai (Godwin, 2004:3). Setidaknya, hal tersebut cukup masuk akal dan masih layak untuk masuk kedalam arena adu pendapat.

Berangkat dari berbagai dinamika dan hal-hal yang masih abu-abu sebagaimana dijabarkan di atas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih dalam dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, perihal tindak-tanduk yang dilakukan oleh Tiongkok dimasa saat ini dan bagaimana kemudian tindakan-tindakan yang mereka lakukan dapat memberi implikasi terhadap dunia dan diri mereka sendiri. Penulis juga berharap, penelitian ini lebih-lebih dapat digunakan sebagai acuan belajar bagi masa mendatang

atau sekiranya, sebuah angin segar bagi ilmu pengetahuan saat ini dan mendatang.

Kebijakan Luar Negeri Tiongkok

Tiongkok memiliki visi yang sangat besar dan global untuk menjadi negara adidaya di dunia. Kebijakan luar negerinya berubah haluan untuk melakukan ekspansi ke belahan dunia lain yang dimulai dari Laut China Selatan (LCS) dan Asia Tenggara sebagai tetangga terdekatnya. Pada aspek ekonomi, Tiongkok dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia disamping Amerika Serikat (AS). Adanya perang dagang membuktikan keseriusan Tiongkok untuk menantang hegemoni AS di dunia dan menjadikannya sebagai negara hegemon. Pada aspek militer, ekspansi wilayah yang dilakukan Tiongkok di LCS menimbulkan masalah baru bagi Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara. Militerisasi LCS memicu kehadiran AS di LCS untuk menyeimbangkan hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Visi global Tiongkok untuk menjadi negara hegemon umumnya fokus pada aspek ekonomi yang disokong oleh militernya dan dimulai dari kawasan-kawasan terdekatnya seperti ASEAN.

Kebijakan partai komunis Tiongkok sangat menentukan kebijakan luar negeri dan merupakan identitas utama Tiongkok. Sebagai negara berkembang yang berubah menjadi negara maju, Tiongkok merupakan bagian dari negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) yang memiliki ekonomi kuat di dunia. Kebijakan luar negeri Tiongkok berlandaskan pada "Five Principles of Peaceful Coexistence". Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

(2014:70) dalam Weissmann (2015:154), kelima prinsip tersebut adalah saling menghormati wilayah dan kedaulatan negara lain, non-agresi, non-intervensi, persamaan dan keuntungan bersama, dan perdamaian. Namun, menurut Jakobson (2013:4) dalam Weissmann (2015:154), Tiongkok juga memiliki tujuan dalam kebijakan luar negerinya, yaitu stabilitas politik domestik, keamanan kedaulatan, wilayah, dan persatuan, serta ketahanan ekonomi dan pembangunan sosial (Weissmann, 2015:154). Kepentingan utama dari prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri tersebut dikarenakan Tiongkok menyadari bahwa mereka memiliki ancaman eksternal terhadap ekonominya yang menjadi ketergantungan utama.

Kebijakan luar negeri Tiongkok mulai berubah sejak masa kepresidenan Xi Jinping pada 2013. Xi Jinping cenderung mengambil keputusan sendirian dan lebih fokus terhadap isu militer. Hal ini membuat militerisasi Tiongkok terhadap Laut China Selatan (LCS) terus berlangsung dan memicu konflik dengan negara-negara lain. Tujuan kebijakan luar negeri di bawah Xi Jinping adalah meraih modernisasi, menciptakan perdamaian, dan mengembangkan ekonomi domestik (Zhao, 2013:116). Tiongkok menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara tetangga. Tiongkok juga memiliki konsep keamanan sebagai "*peaceful rise*" yang bertujuan untuk mengenalkan bahwa bertumbuhnya Tiongkok bukanlah sebuah ancaman dan tidak mengincar posisi hegemon (Weissmann, 2015:160). Namun, kenyataannya secara tidak langsung

Tiongkok telah berkembang menjadi salah satu negara adidaya di dunia dan kepemimpinan Xi Jinping mempertegas hal tersebut.

Kebijakan luar negeri Tiongkok memiliki perubahan dari sejak masa kepemimpinan Deng Xiaoping pada tahun 1990-an, yaitu *taoguangyanghui* yang berfokus pada pembangunan nasional secara diam-diam (Zhao, 2013:103). Perkembangan ekonomi yang pesat dari tahun 1990-an hingga 2000-an secara perlahan merubah eksistensi Tiongkok sebagai negara besar di dunia. Terdapat beberapa penyebab perubahan tersebut, yaitu kemampuan Tiongkok untuk berhubungan dengan negara lain dan banyaknya pihak yang berusaha menghambat berbisusnya Tiongkok (Zhao, 2013:107). Bersinarnya Tiongkok sebagai negara besar membuat keberanian Tiongkok dalam meraih kepentingan nasional menjadi lebih kuat dan tegas. Tiongkok mulai menyebarkan pengaruhnya secara perhalan dengan negara-negara terdekatnya, dimulai dengan ASEAN yang merupakan halaman belakang (*backyard*) bagi Tiongkok.

Hubungan Tiongkok-ASEAN

Asia Tenggara merupakan salah satu pasar ekonomi terbesar Tiongkok dan memiliki banyak kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Setelah krisis finansial Asia pada tahun 1997, Tiongkok banyak memberi bantuan ekonomi kepada negara-negara ASEAN. Tiongkok mengenalkan konsep keamanan baru di ASEAN Regional Forum (ARF) yang menyatakan bahwa Tiongkok secara terus menerus membangun kerja sama dengan negara lain untuk menjaga stabilitas ekonomi

dan kesejahteraan. Hal ini didukung dengan prinsip kepercayaan dan keuntungan bersama, persamaan, dan kerja sama (Tsai, Hung & Liu, 2011:26). Bersamaan dengan konsep keamanan baru, Tiongkok juga mengenalkan “*good neighbor diplomacy*” dengan menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Konsep tersebut berdasarkan prinsip keharmonisan, kemenangan, dan kekayaan sesama serta perdamaian, keamanan, kerja sama, dan kesejahteraan sebagai tujuan (Tsai, Hung & Liu, 2011: 27).

Tiongkok menganggap ASEAN adalah rekan yang dekat dan strategis. Tiongkok dan ASEAN meneken perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2002 yang turut mendekatkan hubungan Tiongkok dan ASEAN melalui kerja sama ekonomi (Zhang & Wang, 2017:165). Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan ekonomi antara kedua belah pihak karena ASEAN adalah pasar yang sangat potensial bagi Tiongkok. Proposal Tiongkok mengenai Belt & Road Initiative (BRI) dianggap lebih dipahami oleh negara-negara ASEAN dibandingkan negara-negara lain, karena akan sangat menguntungkan bagi negara-negara ASEAN. Namun, hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN memiliki ancaman karena adanya konflik LCS. Tiongkok memercayai ASEAN dapat memainkan peranan utama dalam menyelesaikan konflik LCS dan mencegah intervensi dari pihak eksternal (Zhang & Wang, 2017:169).

Tiongkok menggunakan beberapa cara untuk mengeksekusi kebijakan luar negerinya di Asia Tenggara, seperti melalui ekonomi, *soft power*, diplomasi multilateral, dan keamanan. Menurut Stromseth (2019:3),

melalui program BRI Tiongkok mengimplementasikan *good neighbor diplomacy* dengan mengutamakan negara-negara tetangganya yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Tiongkok dapat merangkul negara-negara ASEAN melalui BRI. Selain itu, *soft power* Tiongkok mengadakan pertukaran pelajar dengan mahasiswa negara-negara ASEAN. Cara ini juga didukung dengan melibatkan etnis Tiongkok di negara lain sebagai alat utama *soft power* dan diplomasi publiknya (Stromseth, 2019:4).

Keamanan juga menjadi salah satu fokus Tiongkok untuk menghadirkan dirinya diantara negara-negara ASEAN dan sekaligus menjadi “penjaga”. ASEAN dan Tiongkok membentuk “strategic partnership for peace and prosperity” yang mencakup keamanan di dalamnya pada tahun 2003. Ditambah dengan “*mutual non-aggression pact*” sebagai bentuk perjanjian damai antara ASEAN dan Tiongkok (Tsai, Hung & Liu, 2011:34). Tiongkok mendefinisikan diplomasi multilateral sebagai cara untuk mempromosikan perkembangan yang damai dengan kerja sama internasional. Hal ini dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional dan aktor non-negara. Tujuannya adalah Tiongkok mengutamakan kepentingan negara-negara berkembang dan menentang pengaruh negara-negara kuat seperti AS (Tsai, Hung & Liu, 2011:36). Oleh karena itu, Tiongkok dan ASEAN memiliki forum ASEAN + 1, ASEAN + 3, dan China-ASEAN Expo pada tahun 2004 sebagai bentuk komitmen Tiongkok terhadap rekan strategisnya, ASEAN.

Hubungan Tiongkok-ASEAN baru memulai harmoninya sejak tahun 1970-an

ketika Mao Zedong dan Deng Xiaoping mulai membuka Tiongkok kepada dunia dan pada akhirnya memiliki hubungan yang baik dengan ASEAN (Noonari & Tunio, 2011:74). Tiongkok dan ASEAN dipererat dengan banyaknya kerja sama ekonomi sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi bagi Tiongkok dan ASEAN. Semenjak Tiongkok mulai berubah menjadi raksasa, ketergantungan ini semakin terasa karena jumlah pasar yang semakin besar dan luas.

Kondisi Negara-Negara ASEAN

Strategi Tiongkok yang cenderung agresif dan tegas membuat ASEAN harus menanggapi dengan menyeimbangkan (*balancing*) dan membentuk kerja sama institusional dengan Tiongkok. Shekhar (2012:262) mengatakan strategi ASEAN ini disebut dengan “*hedging*”, yaitu menggunakan dua kebijakan yang berlawanan satu sama lain. Penyeimbangan dilakukan oleh AS yang memiliki kekuatan yang setara dengan Tiongkok. Sedangkan, kerja sama yang dicetuskan adalah ASEAN + 1, ASEAN + 3, ARF, dan ASEAN + Defense Ministerial Meeting (ADMM+). Kedua elemen ini sangat penting untuk menjalankan hubungan yang baik antara Tiongkok dan ASEAN. Kehadiran Tiongkok bisa menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk menjadi teman yang sangat bermanfaat bagi ASEAN dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dimilikinya.

Ketergantungan ekonomi ASEAN dan Tiongkok dibantu dengan mudarnya pengaruh Barat di Asia Tenggara dan menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk mengisinya (Shekhar, 2012:255). Tiongkok

secara gencar memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk mendominasi ASEAN melalui proses kerja sama melalui persuasif dan koersif yang dibantu dengan kekuatan militernya agar menghindari adanya ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya, termasuk LCS. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran Tiongkok yang berpengaruh dan bermanfaat bagi ASEAN sehingga mendapatkan dukungan dan dapat menguasai ASEAN, dengan balasan kerja sama dan hubungan ekonomi yang bermanfaat satu sama lain (Shekhar, 2012:257).

Presiden Tiongkok Xi Jinping berusaha mengembalikan masa kejayaan Jalur Sutra yang membentang dari Asia ke Eropa pada tahun 2013. Xi Jinping memperkenalkan Belt and Road Initiative (BRI) kepada negara-negara Asia Tenggara dan Asia Tengah. BRI menjadi salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok yang sangat vital dengan total investasi sebesar 1 triliun dolar AS (Liu & Lim, 2018:1). Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, BRI dinilai sangat menguntungkan secara ekonomi, tetapi tetap yang paling diuntungkan adalah Tiongkok dibandingkan negara-negara kecil lainnya. Indonesia memiliki pandangan berbeda yang menganggap BRI sebagai sebuah kesempatan karena Indonesia adalah sebuah negara maritim. Investasi asing dan pengembangan infrastruktur maritim tentu sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi Indonesia. Stromseth (2019:7) menilai Indonesia dan BRI adalah “*natural fit*”.

Thailand menjadi negara yang secara tidak langsung “mengakomodasi” Tiongkok. Hal ini disebabkan Thailand memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung

fleksibel, yang disebut sebagai menyesuaikan dengan angin, dengan tujuan untuk bertahan hidup (Cogan, 2019:29). Kebijakan luar negeri Thailand memiliki banyak arah dan tujuan karena Thailand menyadari kekuatan mereka yang terbatas di dunia internasional. Di lain sisi, Thailand juga memiliki aliansi yang dekat dengan negara-negara Barat.

Tiongkok juga mengalami perlawanan dari negara-negara ASEAN, umumnya Vietnam dan Filipina karena konflik LCS. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam dan Filipina seringkali dilanggar oleh Tiongkok dengan membuat pulau buatan di LCS. Ketiga negara ini pada tahun 2004 sempat melakukan eksplorasi gabungan di LCS ketika masa kepemimpinan Presiden Arroyo, tetapi dihentikan karena kurangnya kepercayaan antar pihak (Hendler, 2018:331). Melalui kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Rodrigo Duterte, rencana tersebut mungkin dapat terwujud kembali dengan tambahan aktivitas memancing bersama. Klaim Nine Dash Line dari Tiongkok yang membentang dari Tiongkok Selatan hingga Laut Natuna Utara di Indonesia tentu menjadi salah satu hambatan bagi Tiongkok untuk menjalin hubungan baik dengan ASEAN. Sedangkan, kebijakan luar negeri Vietnam lebih berfokus ke mana pun yang menguntungkan dan berusaha untuk mengimbangi Tiongkok tanpa memprovokasinya (Stromseth, 2019:6). Namun, Tiongkok juga melanggar kedaulatan ZEE Vietnam melalui kegiatan eksplorasi lautnya yang merenggangkan hubungan Tiongkok-Vietnam.

Metode Penelitian

Penelitian “Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok Menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara” bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif menurut Rahmat (2009:2) adalah jenis penelitian yang tidak dapat menggunakan pengukuran data (statistik) untuk mendapatkan hasil atau penemuan. Bogdan & Biklen (1992:21-22) dalam Rahmat (2009:2-3) mengatakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai hasil data deskriptif yang berisi gambaran orang-orang sebagai objeknya yang dapat berupa tulisan, ucapan, maupun perilaku.

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkonstruksi argumen tentang usaha-usaha Tiongkok di Asia Tenggara. Studi kepustakaan menurut Mardalis (1999) dalam Mirzaqon & Purwoko (2018:3) studi kepustakaan adalah pengumpulan informasi atau data yang didapatkan dari berbagai macam materi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen. Selain itu, Nazir (1988) dalam Mirzaqon & Purwoko (2018:4) mengatakan studi kepustakaan memiliki teknik pengumpulan data dengan menelusuri buku, catatan, dan literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas.

Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti buku, jurnal, berita, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang kredibel dan terpercaya baik berbentuk fisik maupun elektronik. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain. Penulis mengutip data dari sumber-sumber tersebut yang berguna bagi penelitian “Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok Menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara”.

Melalui data dari sumber-sumber tersebut data akan diseleksi dan diolah untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis dan pertanyaan penelitian hingga penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Melihat perkembangan yang ada sejauh ini, Tiongkok terlihat sebagai salah satu negara yang berani melawan dan menantang hegemoni Amerika Serikat di dunia. Tak terkecuali di Kawasan Asia Tenggara. Tiongkok terlihat sebagai wajah baru yang cukup kuat dalam perpolitikan internasional terutama dalam hal menggantikan Amerika Serikat sebagai negara hegemon. Tiongkok pun seakan terlihat sebagai *the emerging power* yang mampu menjadi salah satu negara terkuat di dunia khususnya di Asia Tenggara. Untuk memenuhi ambisinya tersebut Tiongkok melakukan berbagai cara. Tentu sudah sangat terlihat bagaimana langkah-langkah Tiongkok untuk bangkit dan menjadi kekuatan hegemon di dunia termasuk di Asia Tenggara. Untuk mendalami hal tersebut, kami menggunakan beberapa aspek kunci yang dapat menjadi ukuran terhadap kekuatan Tiongkok di Asia Tenggara. Terlihat bahwa, Tiongkok sudah melakukan berbagai cara dari berbagai aspek untuk menjadi kekuatan hegemon di Asia Tenggara. Seperti halnya pada bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, dan militer. Bidang-bidang tersebut akan kami jelaskan lebih rinci dalam pembahasan berikut.

Ekonomi

Pada bidang ekonomi Tiongkok memang menjelma menjadi salah satu

kekuatan besar di dunia terkhusus di Asia Tenggara. Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping mengumumkan sebuah rencana besar untuk membangun sebuah jalur sutra baru yang dikenal dengan *Belt and Road Initiative* atau biasa disebut BRI. BRI diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara satu wilayah dengan wilayah lain, juga dapat mendorong arus ekonomi, investasi, konsumsi, serta pertukaran budaya dengan semangat kerjasama regional antara negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika dengan meniru semangat jalur sutra kuno di masa lalu. Sehingga pada program ini memang difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi pondasi utama dalam menciptakan konektivitas antar wilayah. Sebanyak 65 negara sudah menyatakan dukungannya dalam proyek ambisius tersebut. Seperti halnya Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, Bahrain, Mesir, Azerbaijan, hingga Ukraina. Proyek besar ini juga didanai oleh Bank Investasi China dan juga forum Brazil, China, India, Rusia, dan Afrika Selatan (BRICS) (Hei et al., 2018: 1-5).

Hal ini juga dapat menjadikan Tiongkok sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam ekonomi dunia. Dengan diberlakukannya proyek BRI tersebut, negara-negara yang mendukung proyek tersebut mendapatkan dukungan finansial terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan proyek BRI yang memiliki prinsip kerjasama dan keterbukaan, inklusivitas, kerjasama berbasis pasar, dan juga saling menguntungkan satu sama lain dapat mengundang negara-negara lain untuk mendukung proyek tersebut. Berbasis data negara-negara yang sudah menyetujui proyek

ini, maka dapat diestimasikan bahwa proyek ini meliputi 4.4 Miliar masyarakat dunia dan juga bernilai sama dengan 30% GDP global (Huang, 2016:314-321). Sehingga sudah barang tentu mengancam berbagai pihak di luar proyek ini. Apabila program tersebut terlaksana, bukan tidak mungkin Tiongkok akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

Masih berkaitan dalam hal kekuatan ekonomi Tiongkok, terlihat bahwa kemampuan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok memiliki elastisitas yang cukup tinggi. Tidak seperti Amerika Serikat yang cenderung lebih memperhatikan ideologi, aspek lingkungan, dan hak asasi manusia dalam hal kerjasama dan diplomasi ekonomi, Tiongkok terlihat lebih leluasa dengan meniadakan segala aspek tersebut dan membawa segala hal murni ke dalam ranah bisnis dan investasi. Terlihat pula upaya Tiongkok dalam menguatkan dominasinya di Asia Tenggara dalam hal ekonomi dengan cara diplomasi infrastruktur. Terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok baru-baru ini dengan kerjasama infrastruktur kereta api yang menghubungkan Singapura dan Malaysia yang bernilai US\$17 Miliar ini. Di Vietnam, Pemerintah Tiongkok mendanai pembangunan kereta layang sejumlah \$669 juta. Di Laos, Tiongkok juga memperluas pengaruhnya dalam hal pendanaan pembangunan kereta api bernilai \$6 Miliar. Di Indonesia, Tiongkok juga melakukan sejumlah diplomasi ekonomi dalam hal infrastruktur seperti halnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi hingga \$5,9 miliar (Setiaji, 2018).

Kedua belah pihak sangat mengetahui pentingnya kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Tiongkok. ASEAN memiliki potensi pasar yang luas, salah satu jalur perdagangan dunia, dan juga memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Sementara itu, Tiongkok juga memiliki kemampuan finansial yang cukup tinggi dan juga dukungan terhadap aspek pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota ASEAN. Hingga saat ini, Tiongkok merupakan mitra ekonomi terbesar ASEAN dan pada 2020 lalu mereka mencanangkan volume perdagangan hingga US\$ 1 triliun sebagai peringatan 25 tahun kerjasama Tiongkok-ASEAN (Yosephine, 2016).

Politik

Setelah membahas mengenai bidang ekonomi Tiongkok, maka kali ini kami akan membahas mengenai bidang politik Tiongkok dalam upaya menjadi kekuatan hegemon di Asia Tenggara. Bidang politik memang sangat erat bersinggungan dengan bidang ekonomi. Dengan kekuatan ekonomi Tiongkok yang cukup kuat dan kebijakannya yang mendukung aspek pembangunan infrastruktur di negara-negara ASEAN, dapat dikatakan Tiongkok juga mendapatkan sebuah kekuatan politik atau memiliki posisi politik yang cukup kuat di mata negara-negara anggota ASEAN.

Tiongkok juga dapat dikatakan sudah mulai mampu menentang dominasi pengaruh Amerika Serikat di Asia tenggara dengan sejumlah kebijakan ekonominya. Dengan begitu, terjadi penyebaran pengaruh yang cukup kuat oleh Tiongkok ke negara-negara ASEAN. Hal itu juga ditunjukkan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan

memberikan dukungan politik terhadap konsep *Belt and Road Initiative* yang digagas oleh Tiongkok sehingga dapat mempermudah segala langkah yang dilakukan Tiongkok dalam menjalankan programnya di Asia Tenggara.

Kekuatan politik Tiongkok memang sangat erat dan tak bisa dipisahkan dari kekuatan ekonominya. Dengan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam ekonomi, hal tersebut juga berimbas pada politik dengan sistem yang mengarah kepada komunisme dimana pada sistem tersebut menawarkan kestabilan pada pemerintahan sehingga dapat membuat investor maupun kestabilan politik dalam negeri dapat terjaga, juga dengan sistem ekonomi yang kapitalis dapat membuat negara ini menjadi kian makmur sehingga memperkuat kestabilan politik dalam negeri mereka. Kestabilan politik dalam negeri dan kekuatan ekonomi yang luar biasa juga mampu menunjang mereka dalam melaksanakan politik luar negeri. Sehingga mereka memiliki *bargaining position* yang cukup kuat diantara negara-negara lain. Terlebih, posisi mereka yang kini menjadi pesaing utama Amerika Serikat kian menaikkan pamor mereka dalam lingkup hubungan internasional.

Kekuatan politik Tiongkok juga dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam memadukan aspek ekonomi dan politik sehingga bisa mendapatkan posisi penting di ASEAN. Kebijakan Tiongkok yang cukup terbuka dalam hal kerjasama dengan negara lain membuat mereka memiliki banyak rekan dan dapat menjadi rekan strategis bagi negara-negara lain. Hal ini juga yang terjadi pada posisi mereka di ASEAN. Seperti yang sudah dikatakan

sebelumnya bahwa Tiongkok rela menggelontorkan dana yang cukup besar dalam proyek-proyek pembangunan strategis negara-negara ASEAN. Dengan begitu, Tiongkok dapat dikatakan memiliki posisi tawar yang cukup baik dalam hal perpolitikan di ASEAN. Hal tersebut juga tertuang dalam pengaruh politik yang cukup kuat antara Tiongkok dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Laos, Myanmar, Kamboja, dan juga Vietnam. Kekuatan Tiongkok juga terlihat dalam penyelesaian berbagai masalah di wilayah tersebut. Dengan kemampuan ekonomi yang cukup besar, Tiongkok dapat memiliki kekuatan politik sehingga dapat melakukan intervensi pada setiap masalah yang terdapat di Asia Tenggara. Sehingga terlihat bahwa Tiongkok memiliki kekuatan tersendiri di Wilayah Asia Tenggara.

Sosial-Budaya

Dalam hal sosial-budaya, Tiongkok memiliki kekuatan yang cukup erat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Dibuktikan dengan menyebarnya kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh Tiongkok di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan bahkan Myanmar memang memiliki kedekatan kebudayaan yang cukup erat dengan Tiongkok apabila menilik masalah sosial dan kebudayaan yang terdapat didalam negara-negara tersebut. Tak hanya itu, sejak dahulu kala orang-orang Tiongkok sudah melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah Asia Tenggara lainnya dan menyebarkan kebudayaan mereka di wilayah-wilayah tersebut. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura juga memiliki kedekatan kebudayaan imbas dari

persebaran budaya yang dilakukan oleh para pengembara Tiongkok di masa lalu. Kebudayaan Tionghoa yang disebarkan oleh masyarakat Tiongkok terdahulu di Wilayah Asia tenggara memang cukup banyak. Dimulai dari segi makanan, agama, nilai-nilai kehidupan, prinsip ekonomi, hingga dekorasi rumah pun sangat terpengaruh oleh kebudayaan tionghoa. Dari segi makanan misalnya, Tiongkok memiliki pengaruh yang cukup kuat dengan menyebarnya makanan khas mereka di seluruh penjuru Asia. Makanan berupa Mie yang disinyalir berasal dari Tiongkok menjadi makanan yang lazim di Asia. Menyebarnya keturunan-keturunan Tionghoa di Asia juga mempercepat penyebaran makanan ini. Makanan lain seperti hadirnya *dimsum* yang merupakan kebiasaan makanan masyarakat tionghoa juga menjadi makanan yang cukup populer di Asia. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penyebaran makanan juga menjadi salah satu contoh begitu kuatnya pengaruh Tiongkok di Asia terutama Asia Tenggara. Agama pun demikian. Dengan banyaknya imigran asal Tiongkok yang menduduki wilayah-wilayah Asia terutama Asia Tenggara, Agama konghucu pun tersebarnya hingga ke Asia Tenggara. Seperti halnya Myanmar, Vietnam, Kamboja, bahkan Indonesia. Begitu pula yang terdapat dalam nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Melihat banyaknya imigran asal tiongkok yang datang dan pergi di Wilayah Asia tenggara, terdapat cukup banyak nilai-nilai kehidupan masyarakat tionghoa yang kemudian tertanam di masyarakat khususnya masyarakat Kawasan Asia Tenggara. Dekorasi rumah dan bangunan pun juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Seperti halnya

bangunan-bangunan yang ada di Indonesia seperti di Semarang, Cirebon, hingga Surabaya. Terdapat banyak ornamen-ornamen yang bernuansa Tiongkok didalamnya. Hal itu pun terjadi di sejumlah negara seperti Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Thailand dan Laos yang memiliki bangunan dengan pengaruh Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok dapat dikatakan juga memiliki pengaruh yang cukup kuat di bidang sosial-budaya masyarakat ASEAN.

Militer

Seperti yang sudah dikatakan pada bagian-bagian sebelumnya, Tiongkok dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan baru yang bangkit sebagai salah satu negara hegemon di dunia. Berbicara mengenai negara hegemon, tentu tak dapat lepas dari aspek kekuatan militer yang dimiliki oleh negara tersebut. Aspek militer memang masih menjadi salah satu kekuatan yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara. Setelah terjadinya kebangkitan ekonomi yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Tiongkok pada sekitar tahun 1970-1980an dan kemudian berkembang hingga saat ini, Tiongkok pun sadar bahwa kemampuan militernya masih perlu banyak ditingkatkan sehingga mampu muncul sebagai negara hegemon.

Dengan kebangkitan ekonomi itulah Tiongkok muncul sebagai wajah baru musuh Amerika Serikat. Untuk menyaingi kekuatan AS tentu diperlukan kekuatan militer yang memadai pula. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan pertahanan atau fondasi awal pertahanan yang berawal dari kekuatan militer yang

dimiliki oleh Uni Soviet pada sekitar tahun 1980. Kebijakan modernisasi militer ini pun terus dilakukan selama masa perang dingin. Tiongkok pun kemudian mengembangkan kebijakannya dengan melakukan pengembangan angkatan bersenjata secara mandiri. Tiongkok pun dengan kekuatannya semakin melebarkan sayap ke beberapa negara seperti Pakistan hingga Myanmar. Pada titik inilah kekuatan militer yang dimiliki oleh Tiongkok sudah mulai dilirik oleh AS sebagai sebuah ancaman bagi dirinya dan para sekutunya. Sehingga membuat Tiongkok dalam pengawasan serius departemen pertahanan AS (Waldron, 2005: 715-733).

Tiongkok juga melakukan hal yang lebih besar dengan mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh AS selama ini, yaitu dengan membuka pangkalan militer di sejumlah negara di dunia. Di Argentina misalnya, Tiongkok membangun sebuah pangkalan militer yang misterius di wilayah tersebut. Tiongkok dikabarkan membangun sebuah stasiun ruang angkasa di wilayah terpencil di Argentina bernama Patagonia. Namun beberapa pihak meragukan wilayah tersebut benar-benar merupakan stasiun ruang angkasa saja. Pihak militer Tiongkok dikabarkan membangun stasiun ruang angkasa tersebut dengan harga yang cukup fantastis yaitu sebesar \$50 Juta. Pangkalan tersebut dikatakan sebagai sebuah upaya untuk mengubah wilayah Amerika Latin menjadi kekuatan strategis milik Tiongkok. Tiongkok mulai membangun stasiun tersebut sejak 2008 dan belakangan sudah dapat terlihat bahwa stasiun ruang angkasa ini memiliki kemampuan strategis dan memiliki kemampuan layaknya sebuah stasiun militer.

Beberapa pejabat daerah yang terdapat di sekitar wilayah tersebut juga mengatakan bahwa wilayah stasiun ruang angkasa tersebut bekerja layaknya sebuah pangkalan militer. Sehingga, dapat dikatakan Tiongkok telah membangun sebuah basis militer di daerah tersebut (Londono, 2018).

Selain di Argentina, Tiongkok juga disebut membangun pangkalan militer di Djibouti. Di Negara tersebut, Tiongkok membangun sebuah pangkalan angkatan laut yang berawal dari sebuah misi perdamaian PBB yang kemudian Tiongkok membuat sebuah pangkalan angkatan laut dengan dalih sebagai sebuah fasilitas logistik belaka. Namun, para pejabat Tiongkok juga mulai memikirkan mengenai alih fungsi pangkalan tersebut yang semula fasilitas logistik sebagai fasilitas pendukung untuk melindungi keamanan nasional Tiongkok. Pangkalan tersebut juga mencakup berbagai urusan seperti halnya marinir, *drone*, dan juga pasukan khusus yang berjaga. Meski begitu, Pemerintah Tiongkok juga secara resmi masih bersikukuh pada pendirian mereka bahwa pendirian pangkalan militer di Djibouti merupakan misi perdamaian dan upaya meyakinkan negara-negara Afrika terhadap Tiongkok dalam hal penciptaan perdamaian (Cabestan, 2019:11-17).

Pemerintah Tiongkok juga gemar membangun pangkalan militer di luar negeri. Seperti halnya yang terjadi di Tajikistan. Pemerintah Tiongkok membangun sebuah pangkalan militer di dekat perbatasan Tajikistan-Afghanistan sebagai rencana lanjutan dari misi membangun pangkalan militer di dunia. Selama 3 tahun terakhir, pasukan Tiongkok telah terus mengawasi wilayah tersebut dan mendudukinya sebagai

suatu pangkalan militer. Dikatakan bahwa tujuan dibangunnya fasilitas militer tersebut antara lain untuk kebutuhan keamanan nasional Tiongkok, serta untuk mendukung kepentingan nasional Tiongkok di sejumlah negara seperti halnya Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan dan juga Pakistan (Shih, 2019).

Kesimpulan

Menilik keadaan dunia sebagaimana hari ini, Tiongkok sudah bisa dipandang sebagai kelahiran hegemon baru. Tidak hanya sebatas di kawasan Benua Asia, namun bahkan dirasakan sampai ke berbagai pelosok dunia. Meskipun sang presiden, Xi Jinping, menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk menjadi hegemon, itu tidak serta merta menghapus *status quo* yang mereka miliki saat ini. *Status quo* yang mereka miliki saat ini tentu kita semua mengetahuinya, sebuah kekuatan besar yang merangsek tatanan dunia tradisional. Sebuah kekuatan baru yang masih segar dan muda, yang dirasa-rasa bisa menjadi sebuah revolusi.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Tiongkok berusaha untuk menjadi regional hegemon di Asia Tenggara melalui aspek-aspek yang dikuasainya. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Tiongkok sangat jelas menginginkan posisi Tiongkok untuk berada di atas negara-negara ASEAN. Berawal dari Asia Tenggara, Tiongkok dapat melanjutkannya ke tujuan yang jauh lebih besar seperti menjadi hegemoni dunia. Kekayaan ekonomi, kemampuan diplomasi, banyaknya etnis Tiongkok di seluruh dunia, dan kekuatan militer yang dimiliki Tiongkok membantu untuk meraih tujuan tersebut. Tiongkok telah memiliki modal yang sangat baik untuk

berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang berusaha mencegah hal tersebut untuk terjadi.

Apa yang diraih oleh Tiongkok saat ini sudah cukup mengguncang dunia dan menggoyangkan kestabilan hegemon negara-negara pendahulunya. Tiongkok tidak bisa terlalu tergesa-gesa untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Semakin tergesa-gesa, akan menimbulkan polemik yang justru tidak akan menghasilkan hegemon sebagaimana yang mereka inginkan. Perlu beberapa tahun dan metode perlahan bagi Tiongkok untuk menancapkan pengaruh-pengaruh yang mereka miliki di seluruh dunia. Langkah yang harus diambil Tiongkok kedepan adalah mengurangi ego yang mereka miliki, dan berusaha berdamai dengan “musuh-musuh” yang mereka miliki. Pada dasarnya, “musuh-musuh” yang mereka miliki ini sebenarnya adalah aset untuk menjadi katalis serta wadah dari bertumbuhnya hegemon yang mereka miliki di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Internet (artikel dalam jurnal online):

- Cabestan, J. P. (2019). China's Military Base in Djibouti: A Microcosm of China's Growing Competition with the United States and New Bipolarity. *Journal of Contemporary China*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1704994>, diakses 14 Mei 2021
- Cogan, Mark S. (2019). "Is Thailand Accomodating China?" *Southeast Asian Social Science Review* Volume 4, No. 2: 24-47. (https://www.researchgate.net/publication/336503939_Is_Thailand_Accommodating_China, diakses 15 Mei 2021).
- Godwin, Paul. (2004). "China as Regional Hegemon?" In *The Asia Pacific: A Region in Transition*, by Jim Rolfe, 81-101. Honolulu: Asia Pacific Center for Security Studies. (<https://apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/RegionalFinal%20chapters/BOOKforwebsite.pdf>, diakses 26 Mei 2021).
- Hei, L., Rohr, C., Hafner, M., & Knack, A. (2018). China Belt and Road Initiative. RAND Europe. Diakses 17 Mei 2021
- Hendler, Bruno. (2018). "Duterte's Pivot to China, and Prospects for Settling the South China Sea Disputes." *Contexto Internacional* Volume 40, No. 2: 319-337. (<https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2018400200005>, diakses 18 Mei 2021).
- Herrington, M. L. (2011). Why the Rise of China Will Not Lead to Global Hegemony. *E-International Relations Students*, 1-16. <http://www.e-ir.info/2011/07/15/why-the-precarious-rise-of-china-will-not-lead-to-global-hegemony/>, diakses 18 Mei 2021
- Huang, Y. (2016). Understanding China's Belt & Road initiative: motivation, framework and assessment. *China Economic Review*, Volume 40, 314-321. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007>, diakses 14 Mei 2021

- Liu, Hong, and Guanie Lim. (2018). "The Political Economy of a Rising China in Southeast Asia: Malaysia's Response to the Belt and Road Initiative." *Journal of Contemporary China* 1-16. (<https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1511393>, diakses 15 Mei 2021).
- Mirzaqon, Abdi, and Budi Purwoko. (2018). "STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING EXPRESSIVE WRITING." *Jurnal BK UNESA* Volume 8 No. 1: 1-8. (<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037/20201>, diakses 23 Mei 2021).
- Noonari, Majid Ali, and Abdul Latif Tunio. (2011). "China-ASEAN Relations: Opportunities and Challenges." *Asia Pacific*: 71-82. (https://www.researchgate.net/publication/337049949_China-ASEAN_Relations_Opportunities_and_Challenges, diakses 19 Mei 2021).
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). "Penelitian Kualitatif." *Equilibrium* Volume 5, No. 9: 1-8. (<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>), diakses 20 Mei 2021).
- Roy, Denny. (2020). "China Won't Achieve Regional Hegemony." *The Washington Quarterly* Volume 43, No. 1: 101-117. (<https://doi.org/10.1080/0163660X.2020.1734301>, diakses 26 Mei 2021).
- Shekhar, Vibhanshu. (2012). "ASEAN's Response to the Rise of China: Deploying a Hedging Strategy." *China Report* (SAGE) Volume 48, No. 3: 253-268. (<https://doi.org/10.1177/0009445512462314>, diakses 17 Mei 2021).
- Stromseth, Jonathan. (2019). *The testing ground: China's rising influence in Southeast Asia and regional responses*. Washington D.C.: The Brookings Institution. (<https://www.brookings.edu/research/the-testing-ground-chinas-rising-influence-in-southeast-asia-and-regional-responses/>, diakses 14 Mei 2021).
- Tsai, Tung-Chieh, Ming-te Hung, and Tony Tai-Ting Liu. (2011). "China's foreign policy in Southeast Asia: Harmonious worldview and its impact on good neighbor diplomacy." *Journal of Contemporary Eastern Asia* Volume 10, No. 1: 25-42. (<https://doi.org/10.17477/jcea.2011.10.1.025>, diakses 16 Mei 2021).
- Vu, Truong-Minh. (2017). "International Leadership as a Process: The case of China in Southeast Asia." *Revista Brasileira de Política Internacional* Volume 40, No. 1: 1-21. (<https://doi.org/10.1590/0034-7329201600109>, diakses 26 Mei 2021).
- Waldron, A. (2005). *The Rise of China: Military and Political Implications*. *Review of International Studies*, Volume 3, 715-733. <http://www.jstor.org/stable/40072117>, diakses 16 Mei 2021
- Weissmann, Mikael. (2015). "Chinese Foreign Policy in a Global

- Perspective: A Responsible Reformer "Striving For Achievement". *JCIR* Volume 3, No. 1: 151-166. (<https://doi.org/10.5278/ojs.jcir.v3i1.1150>, diakses 11 Mei 2021).
- Zhang, Yunling, and Yuzhu Wang. (2017). "ASEAN in China's Grand Strategy." *ASEAN@50* 158-175. (https://www.eria.org/ASEAN_at_50_4A.9_Zhang_and_Wang_final.pdf, diakses 13 Mei 2021).
- Zhao, Suisheng. (2013). "Chinese Foreign Policy as a Rising Power to find its Rightful Place." *PERCEPTIONS*. Volume 18, No. 1: 101-128. (<https://core.ac.uk/download/pdf/80590842.pdf>, diakses 13 Mei 2021).
- Internet (karya individual):**
- Londono, E. 28 Juli 2018. From a Space Station in Argentina, China Expands Its Reach in Latin America. *New York Times*. (<https://www.nytimes.com/2018/07/28/world/americas/china-latin-america.html>, Diakses pada 11 Mei 2021.)
- Setiaji, H. 13 Februari 2018. Diplomasi Kereta China di Asia Tenggara. *CNBC Indonesia*. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180213124250-4-4228/diplomasi-kereta-china-di-asia-tenggara>, Diakses pada 11 Mei 2021.)
- Shih, G. 19 Februari 2019. n Central Asia's forbidding highlands, a quiet newcomer: Chinese troops. *New York Times*. (https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html, Diakses pada 11 Mei 2021)
- Yosephine, L. 10 Juni 2016. ASEAN, China target \$1 Trillion in Trade by 2020. *Jakarta Post*. ASEAN, China target \$1 trillion in trade by 2020 This article was published in thejakartapost.com with the title "ASEAN, China target \$1 trillion in trade by 2020". (<https://www.thejakartapost.com/asia/2016/06/10/asean-china-target-1-trillion>, Diakses pada 11 Mei 2021.)